

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan pembahasan skripsi ini berdasarkan data-data yang diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi serta mengacu pada beberapa referensi maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Peran pemerintah dalam menangani konflik antar pedagang di Pujasera Sport Center Kota Blitar sudah tergolong cukup baik. Pemerintah daerah telah berupaya aktif dengan berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam menyelesaikan konflik. Hal tersebut dapat dilihat dari proses mediasi yang dilakukan pemerintah dan upaya untuk melibatkan berbagai pihak dalam proses penyelesaian permasalahan. Dalam penyelesaian konflik yang terjadi pemerintah berfokus pada upaya mediasi sebagai solusi utama dalam penyelesaian konflik yang terjadi antar pedagang di Pujasera Sport Center Kota Blitar.
2. Faktor penyebab terjadinya konflik yang terjadi di Pujasera Sport Center Kota Blitar yaitu kurangnya komunikasi yang terjalin antar anggota dan pengurus dimana adanya pedagang baru yang berjualan di area Pujasera yang menyebabkan ketidaknyamanan pedagang lama. Ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pedagang lama menyebabkan terjadinya konflik. Dalam permasalahan yang terjadi bentuk konflik yang dilakukan antara pedagang baru dan pedagang lama yaitu berupa adu argumen tanpa melibatkan kekerasan fisik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Bagi Paguyuban Pujasera Sport Center Kota Blitar, untuk pengelolaan yang dilakukan paguyuban terhadap Pujasera Sport Center, peraturan-peraturan yang ada dan yang sudah disepakati dibuat tertulis dan ditetapkan oleh Pembina Sport Center. Setiap ketika ada perubahan dalam struktur paguyuban, struktur tersebut segera diperbarui sesuai dengan yang telah disepakati. Dalam proses ketika adanya pedagang baru yang akan ikut bergabung dalam Pujasera disarankan dibuat alur pendaftaran yang lebih jelas dan terstruktur.
2. Dalam lingkup Pujasera diadakan sanksi-sanksi yang dituangkan dalam tulisan dan ditetapkan oleh pembina dan pihak terkait Sport center untuk oknum-oknum yang tidak menaati peraturan yang ada.
3. Bagi pedagang, pedagang harus benar-benar menaati dan melakukan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
4. Bagi Pemerintah Daerah, dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi sebaiknya pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait lebih aktif ikut serta dalam memutuskan kebijakan untuk penyelesaian konflik. Pemerintah setempat dan pihak pihak terkait seharusnya ikut andil dalam membuat keputusan-keputusan untuk mengatur Pujasera Sport Center Kota Blitar.
5. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian yang serupa dengan membandingkan efektivitas mediasi dengan intervensi lain dalam penyelesaian konflik yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrinaldo, I. (2021). Analisis Konflik antara Pedagang Pasar Atas dengan Pemerintah Kota dalam Pembangunan Pasar Atas Bukittinggi Pasca Kebakaran Tahun 2017. *Jurnal Ilmu Politik*, 3 (2), 70-89
- Asdarfian, M. (2017). Peran Pemerintah Daerah dalam Menyelesaikan Konflik Antar Kelompok di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara. Sarjana S1 Ilmu Pemerintahan: Universitas Muhammadiyah Makassar
- Azizah, N. (2023). *Konflik Sosial Ekonomi di Ruang Publik*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Azizah Raja, N. (2019). Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 53–66.
- Burton, J.W (2020). *Conflict and Communication*. Jurnal Internasional: *The Use of Controlled Communication in International Relations*.
- Carlonia, A.L (2021). *Manajemen Konflik Penataan Pedagang Kaki Lima di taman Badaan Kota Magelang*. Sarjana S1 Ilmu Administrasi Negara: Universitas Tidar
- Dewi, L. (2022). *Manajemen Konflik dan Resolusi Sosial di tingkat Lokal*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hafifa, N. (2018). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Antar Kelurahan Kambiolangi dengan Kelurahan Salubarani di Perbatasan Kabupaten Enrekang-Kabupaten Tana Toraja. Sarjana S1 Ilmu Pemerintahan: Universitas Muhammadiyah Makkasar.
- Irawan, S.A (2023). Peran Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik Menahun Masyarakat Adat dengan Perusahaan Perkebunan Karet di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6 (4) 922-935.
- Kusumastuti, H., dkk. (2020). Upaya Pemerinttah dalam Mengatasi Konflik Sosial di Pekon Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. *Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat: Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai*
- Yuvinda, L. (2021). ''Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam Penyelesaian Konflik Antara Masyarakat dengan Korporasi'' Skripsi:Universitas Airlangga

- Lawolo, L. (2023). “*Peranan Pemerintah dalam Penanganan Konflik Sosial Pada Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*”. Medan: Universitas Medan Area
- Lubis, D.M., dkk. (2024). Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik Sosial Untuk Mewujudkan Stabilitas Wilayah.(Studi Kasus di Kota Bandung). *Jurnal Prinsip:Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan, 1(1)*.
- Lynch, K. (2021). Konflik dan Tata Ruang. *Jurnal Internasional: The Image of the City. MIT Press*
- Nugroho, R. (2020). *Public Policy and Governance*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Permata, E.A dan Agus, M.F. (2022). Konflik Pedangang Pasar dan Pemerintah dalam Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional di Kabupaten Ponorogo. *Paradigma, 11(1)*.
- Ramadhani, A.I., dkk. (2025) Teori Manajemen Konflik. *Pusat Publikai Ilmu Manajemen, 3(1)*.
- Sulaiman, S.Z.J.S. (2019). *Konflik antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Masyarakat Dalam kebijakan Penataan PKL*. Sarjana thesis: Universitas Brawijaya
- Wicaksono, T. (2024). “Peran Pemerintah Daerah dalam Mediasi Konflik Ekonomi Lokal,” *Jurnal Kebijakan Publik*, 18(1), 22-35.
- Wirawan. 2010. “Konflik dan Manajemen Konflik; Teori, Aplikasi dan Penelitian”. Jakarta: Salemba Humanika.